BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Dewasa ini Hubungan Internasionl merupakan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan yang sedang tumbuh dan berkembang. Dinamika Hubungan Internasional pada satu dasawarsa terakhir menunjukkan berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Berakhirnya Perang Dingin telah merubah aturan sistem Internasional dari *bipolar* menuju pada *multipolar* atau secara khusus telah mengakhiri persaingan yang bernuansa militer kearah peraingan atau konflik kepentingan ekonomi diantara negara-negara dunia ini.

Pasca Perang Dingin yang ditandai dengan berakhirnya persaingan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet telah mempengaruhi isu-isu dalam Hubungan Internasional,dimana sebelumnya lebih difokuskan pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) menjadi isu-isu *low politics* (seperti hak asasi manusia, ekonomi, lingkungan hidup dan terorisme). Oleh karena itu, tidak mengherankan bila fenomena-fenomena Hubungan Internasional kini telah memasuki dimensi baru yang perlu ditangani dengan perangkat teoritis dan metodologi yang memadai dan akurat sehingga mengakibatkan munculnya beragam definisi mengenai Hubungan Internasional dari para ahli Hubungan Internasional.

Istilah Hubungan Internasional (*international relations*) bisa ditinjau dalam dua pengertian, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai suatu realitas sosial. Sebagi disiplin ilmu, Hubungan Internasional adalah ilmu yang mepelajari segala macam bentuk hubungan antar negara, antar bangsa, antar pemerintahan, dan antar orang perorangan yang melintasi batas antar negara. Banyak yang berpendapat bahwa Ilmu Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar negara. Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggot masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar.

Hubungan Internasional bersifat sangat kompleks, karena di dalamnya terdapat bermacam-macam bangsa yang memiliki kedaulatan masing-masing, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih menyeluruh dan rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia di dalam suatu negara. Namun, pada dasarnya, tujuan utama studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku para aktor negara dan non-negara. Perilaku tersebut bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan aliansi, interaksi dalam organisasi Internasional, dan sebagainya.

Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara.

> Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat Internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar“ (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku Internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non negara, didalam arena interaksi Internasional. Perilaku ini bisa dikatakan kerjasama adanya suatu konflik atau perang serta interaksi dalam organisasi Internasional. Pada awal perkembanganya *Schwarzenberger* berpendapat bahwa Ilmu Hubungan Internasional adalah :

> “Bagian dari sosiologi yang khusus mempelajari masyarakat Internasional (*sociology of Internasional relations*). Jadi, Ilmu Hubungan Internasional dalam arti umum tidak hanya mencakup unsur politik saja, tetapi juga mencakup unsur-unsur ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, perpindahan penduduk (imigrasi dan emigrasi), pariwisata, olimpiade (olahraga) atau pertukaran budaya (*cultural exchange*)” (2005:01).

Menurut DR. Anak Agung Banyu Perwita & DR. Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non-negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional” (Perwita & Yani, 2005: 7-8).

Dalam studi Hubungan Internasional terdapat berbagai pemikiran diantaranya yaitu liberalisme. Liberalisme adalah pemikiran politik, ekonomi,

teori sosial dan filosofi yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia dan meyakini kebebasan individu dan peningkatan kehidupan manusia. Secara politik, liberalisme diterjemahkan sebagai keterbatasan peran pemerintah (Steans, 2001: 48).

Menurut *The Dictionary of world politics*, Hubungan Internasional adalah "*istilah* yang *digunkan untuk melihat seruruh interaksi antara aktor-aktor dengan melawan batas-batas negara"*. Hubungan Internasional akan berkaitan segala bentuk interaki antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan pemerintahan atau pun warga negara sehingga segala interaksi yang kompliks dan melintas batas negara membuat batas-batas politik. Hubungan Internasional mencakup pengajian terhadap politik luar negeri dan politik Internasional, dan meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara didunia (Perwita & A. Yani, 2005: 4)

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama timbul apabila orang-orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Dengan kata lain, kerjasama Internasional dapat terbentuk karena kehidupan Internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideolagi, politik,

ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Hal tersebut menimbulkan kepentingan yang beragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial.

Kerjasama dapat tercipta sebagai akibat dari penyesuaian-penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi diperlukan suatu perundingan.

Seperti yang dijalankan oleh Pemerintah Amerika Serikat dengan Pemerintah Republik Indonesia, kerjasama yang di jalin adalah guna untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33).

Dalam suatu kerjasama Internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama Internasional adalah sisi lain dari konflik Internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama Internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Kerjasama Internasional tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor Internasional lainnya. Keharusan tersebut diakibatkan adanya saling

ketergantungan diantara aktor-aktor Internasional dan kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor Internasional.

2.3 Kerjasama Bilateral

Ada dua macam lembaga yang mengurus bantuan luar negeri untuk negara-negara yang membutuhkanya, pertama yaitu badan Internasional yang mengurus bantuan-bantuan luar negeri dengan ketentuan-ketentauan yang ditetpkan oleh negara-negara anggotanya. Badan yang dimaksud adalah badan multilateral. Kedua, pada setiap negara pemberi bantuan, biasanya dibentuk suatu badan yang mengurus pemberian bantuan tersebut dibawah otoritas pemerintahanya masing-masing. Badan itu dinamakan badan bilateral.

Dalam buku "Pengantar ilmu Hubungan Internasional", Perwita dan Yani mengartikan hubungan bilateral merupakan keadaan yang mengambarkan hubungan timbale balik antara dua pihak yang terlibat, dan actor utamanya dalam pelaksanaan hubungan bilateral ini adalah negara (2005:28).

Seperti dijelaskan dalam buku "Ekonomi Politik Internasional" Yanuar Ikbar. Badan-badan bilateral mempunyai hubungan dengan program pemerintah bantuan luar negeri, biasanya sebagian besar negara memberi bantuan tersebut, terdapat pula badan serupa kementerian atau kelembagaan atau khusus yang bertanggung jawab atas kebijakan bentuk yang diberikan kepada negara-negara peminta bantuan dengan prosedur bilateral. (2006:194)

Pemindahan sumber-sumber secara bilateral dapat dibedakan kedalam 3 kategori.

1. *Grant* ialah pemberian atau hibah, terutama terdiri dari sumbangan berupa uang atau barang, biasanya ditunjukan untuk aktifitas sosial (bencana alam dan semacamnya) dan biaya yang dikeluarkan untuk bantuan teknis.
2. Sumbangan serupa grant terdiri dari pemberian utang yang pembayaran kembalinya tidak harus dikembalikan dalam bentuk ” uang kertas”.
3. Model pemerintaha dalam waktu panjang, terdiri dari pemerintah utang dengan masa pelunasan lebih dari satu tahun dan pembayaran kembali dalam mata uang negara pemberi atau dalam mata uang negara yang konvertibel. (2006:197)

> “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah sebuah negara akan mengejar kepentingan nasionalnya demi mendapatkan keuntungan yang maksimal dan cara satu-satunya adalah dengan membuat hubungan baik dan berkepanjangan antar negara” (Rana, 2002:15-16).

Sebagai contoh dari bentuk kerjasama bilateral ialah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Ameriks Serikat. Dalam kerjasama ini pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintah Indonesia namun melewati lembaga kerjasama yaitu USAID

Amerika Serikat menyalurkan bantuan keseluruhan dunia melalui dua macam channel yaitu:

1. Secara bilateral (*government to government*)

   secara bilateral Amerika Serikat memberikan bantuan kepada negara berkembang salah satu adalah melalui Amerika Serikat
2. Melalui channel yang luas secara multilateral

(http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=id|en&u=http://id.wikipedia.org/wiki/Kedutaan_Besar_Amerika_Serikat_di_Jakarta) (27 April 2010)

2.4 Konsep Peranan

Peranan USAID dapat dikatakan sebagai upaya dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga kerjasama yang memberikan bantuan bagi negara-negara berkembang dalam menjalankan proses pembangunan. Perana USAID tersebut tentu tidak dapat dipisahkan dari peranan nasional negara yang mendirikanya.Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.

Jadi peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi-fungsi oleh struktur-struktur tertentu. Peranan ini tergantung juga pada posisi atau kedudukan struktur itu dan harapan lingkungan sekitar terhadap struktur tadi. Peranan juga dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta kemampuan dari aktor tersebut (Perwita&Yani, 2005: 31).

Menurut Mochtar Mas'oed dalam buku yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional karangan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani bahwa

> "Peranan (role) adalah prilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut" (2005:30)

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukanya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2001:268)

2.5 Bantuan Luar Negeri

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrumen kebijakan yang sering digunakan dalam hubungan luar negeri, secara umum bantuan luar negeri dapat diartikan sebagai transfer sumber daya dari suatu pemerintah ke pemerintah yang lain, baik itu berbentuk barang ataupun dana.

Menurut Sukirno dalam Perwita dan Yani, bahwa bantuan luar negeri pada umumnya tidak ditujukan hanya untuk kepentingan jangka pendek, melainkan untuk prinsip-prinsip kemanusiaan dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Setidaknya terdapat dua syarat aliran modal luar negeri yang merupakan bantuan luar negeri :

1. Aliran modal dari luar negeri tersebut bukan didorong untuk mencari keuntungan.
2. Aliran modal dari luar negeri tersebut diberikan kepada negara penerima atau dipinjamkan dengan syarat yang lebih ringan dari pada yang berlaku dalam pasar Internasional. (2005:83)

Bantuan luar negeri merupakan salah satu instrument kebijakan luar negeri. Bantuan luar negeri merupakan tindakan ekonomi yang memiliki sifat dan efektifitas yang berbeda dibandingkn diplomasi dan propaganda. Apapun pengertian mengenai bantuan luar negeri menurut Yanuar Ikbar yaitu:

> Bantuan luar negeri (*foreign aid*) diartikan sebagai tindakan-tindakan masyarakat atau lembaga-lembaga terhadap masyarakat atau lembaga-lembaga lain di luar negeri dengan maksud sekurang-kurangnya untuk membantu (2007:188).

Menurut Rix Alam dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" karangan Perwita dan Yani ada empat motivasi dar negara para pemberi bantuan atau negara donor dalam memberikan bantuan, diantaranya:

1. Motivasi kemanusiaan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan di negara-negara dunia ketiga melalui dukungan kerjasama ekonomi.
2. Motivasi politik yang merumuskan tujuan untuk meningkatkan *image* negara donor. Peralihan pujian menjadi tujuan dari pemberian bantuan luar negeri baik dari politik domestic dan hubungan luar negeri negara donor.
3. Motivasi keamanan nasional, yang mendasarkan pada asumsi bahwa bantuan luar negeri dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang akan mendorong stabilitas politik dan akan memberikan keuntungan pada kepentingan negara donor. Dengan kata lain, motifasi keamanan memiliki sisi ekonomi.
4. Motivasi yang berkaitan dengan kepentingan nasional negara donor (2005:84).

Menurut Michale Todaro dalam buku Yanuar Ikbar, bantuan luar negeri adalah yang meliputi semua pinjaman konsesional (suku bunga dan jangka pembayaran kembali modal yang dipinjamkan secara lunak dibandingkan dengan syarat-syarat yang berlaku bagi pinjaman kormersial) dan bantuan pemerintah dalam bentuk uang atau barang, mengalihkan sumber-sumber dari negara kayak ke negara dunia ketiga dengan tujuan untuk pembangunan atau pemerataan

pendapatan. Jika dilihat dari katagori bantuan ada lima katagori tipe bantuan luar negeri Amerika Serikat adalah

1. Bilateral *development assistance* program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan, kebanyakan anggaran ini dijalankan oleh USAID dan digunakan untuk proyek-proyek jangka panjang ekonomi, pembangunan, pelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat
2. *Economic aid supporting* U.S *political strategis* Amerika Serikat melalui bantuan ekonomi.
3. *Humanitarian assistance* bantuan ini utuk membantu bencana-bencana kemanusiaan dan sifatnya darurat tidak untuk jangka panjang.
4. *Multilateral assistance* diberikan bersama donor lainya.
5. *Military assistance* bantuan yang ditujukan untuk kepentingan militer dan keamanan Amerika Serikat.
   (http://translate.google.com/translate?hl=en&langpair=id|en&u=http://politik.mitrasites.com/politik-luar-negeri-amerika-serikat.html)

2.5 Lingkungan

Lingkungan dalam konteks Hubungan Internasional adalah bahwa saat ini isu lingkungan tidak lagi hanya menjadi isu-isu nasional saja melainkan sudah menjadi isu-isu Internasional. kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan masih sangat kurang. Terutama di wilayah pesisir yang merupakan wilayah yang sangat komplek. Kesadaran masyarakat tentang pelestarian lingkungan masih rendah, tercermin dari kegiatan sehari-hari misalnya masih

membuang sampah sembarangan, anggapan membakar sampah adalah cara membuang sampah yang paling praktis dan cepat, penebangan dan pengrusakan hutan tanpa penanaman kembali, pembangunan perumahan maupun perkantoran tanpa memperhitungkan resapan air ke dalam tanah, dll. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan antara lain dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kepada masyarakat secara intensif serta melibatkan secara langsung masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan pengelolaan wilayah.

Menurut Dahuri *et all*, 2008). Wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, apabila ditinjau dari garis pantai wilayah pesisir memiliki dua macam batas yaitu batas sejajar garis pantai dan batas tegak lurus garis pantai Salah satu tujuan pengelolaan suatu wilayah pesisir adalah untuk mengendalikan erosi (abrasi) pantai. Suatu sistem pengelolaan sumberdaya alam di suatu tempat dimana masyarakat lokal di tempat tersebut terlibat secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya. Arah kebijakan pemerintah dimasa lalu yang lebih memprioritaskan pembangunan masyarakat perkotaan dan pembangunan pertanian pedalaman, menyebabkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan.

Arah kebijakan saat ini seharusnya adalah memmberikan perhatian yang sama pada masyarakat pesisir, dengan cara memberdayakan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat, bukan atau tidak ditekankan pada pemberian uang atau barang kepada masyarakat, tetapi dengan pelatihan-pelatihan dan pendampingan tentang pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan.

Pendampingan dan pelatihan yang terus menerus dilakukan secara konsisten akan menambah kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam dan melestarikan lingkungannya secara mandiri. Kebijakan yang ada selama ini, pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, tanpa melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Sehingga rasa memiliki serta pemahaman tentang kegunaan dan pelestarian hampir tidak ada sama sekali pada masyarakat setempat. Padahal apabila dilihat dari karakteristik masyarakat wilayah pesisir dan lautan sangatlah kompleks dan beragam, sehingga dalam pengelolaan wilayah pesisir sudah seharusnya melibatkan masyarakat setempat.

(sumber: buku Pengelolaan Taman Nasional Bunaken)

Secara ekologis, manusia adalah bagian dari lingkungan hidup. Komponen yang berada di sekitar manusia yang sekaligus sebagai sumber mutlak kehidupannya merupakan lingkungan hidup manusia. Lingkungan hidup inilah yang menyediakan berbagai sumber daya alam yang menjadi daya dukung bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang berguna bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang (Suratmo, 2004:4).

Indonesia sangat kaya akan sumber daya alamnya, terutama hutan-hutannya yang sangat luas dan lebat. Pengertian sumber daya alam menurut Gunarwan Suratmo dalam bukunya *Analisis mengenai Dampak Lingkungan* adalah: “Sumber Daya Alam adalah Segala sesuatu di alam yang berguna bagi

manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang telah digunakan masa kini atau yang akan digunakan di masa yang akan datang".